

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bantuan dari FAO untuk menanggulangi permasalahan krisis pangan di Sudan Selatan pada tahun 2014 mengalami permasalahan dikarenakan adanya hambatan yang dilakukan oleh pemerintah Sudan Selatan. Perihal, krisis pangan (*food crisis*) merupakan sebuah kondisi yang dapat menjadi ancaman dan menimbulkan banyak kerugian bagi suatu negara.

Berdasarkan OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) di dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition*, krisis pangan diartikan sebagai bagian fundamental dari hak asasi manusia (*human rights*) yakni menginginkan kebebasan dari kelaparan dan malnutrisi. Krisis pangan diidentifikasi sebagai salah satu permasalahan global yang tengah dihadapi masyarakat dunia.¹ Hal tersebut disebabkan karena isu krisis pangan telah melibatkan dan menarik perhatian, serta respon dari aktor negara, aktor bukan negara, atau komunitas global untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan tersebut.²

Sudan Selatan merupakan salah satu negara termuda yang terletak di bagian kawasan Sub Sahara Afrika yang memiliki permasalahan global yang

¹ OHCHR, "Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition", Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/eradicationofhungerandmalnutrition.aspx> (Diakses pada 2018).

² Susanne Jaspars and Steve Wiggins, "The Global food crisis: an overview"(United Kingdom: HPN Humanitarian Practice Network, May 2009), 2.

buruk terkait krisis pangan (*food crisis*).³ Ditambah lagi Sudan Selatan juga dikategorikan sebagai negara yang sulit untuk maju (*underdeveloped country*) seiring dengan kondisi negara yang sedang mengalami konflik sehingga menyebabkan krisis. Dari sisi perekonomian, hampir seluruh populasi di Sudan Selatan dikategorikan miskin karena populasi tersebut memiliki pendapatan yang sangat rendah yang dinilai kurang dari 1 dolar per hari.⁴ Tidak hanya itu, kondisi Sudan Selatan semakin sulit dengan bertambahnya kasus krisis pangan.

Permasalahan krisis pangan di Sudan Selatan dinilai semakin buruk akibat konflik internal. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan *World Food Program* (WFP) mengenai faktor penyebab krisis pangan. Berdasarkan WFP, faktor kemunculan krisis pangan diantaranya yaitu perang sipil, perang antar negara bagian di dalam negara (*interstate war*), kehancuran demokrasi dan kewenangan (*democratic and authoritarian breakdown*), serta protes yang menimbulkan kekerasan dan kerusuhan (*protest and rioting*).⁵

Faktor munculnya krisis pangan di Sudan Selatan tidak terjadi secara langsung. Adapun permasalahan dari krisis pangan di Sudan Selatan didorong oleh faktor konflik internal di Sudan Selatan yang telah terjadi sejak bulan Desember 2013. Konflik internal yang mempengaruhi krisis pangan di Sudan Selatan merupakan krisis politik. Tidak hanya itu, konflik internal yang mempengaruhi krisis pangan di Sudan Selatan juga dilatarbelakangi oleh faktor historis dari kolonialisasi. Berdasarkan aspek historis, Sudan Selatan dijajah oleh

³ Scott Johnson, "Why South Sudan May Face World's Worst Famine in Quarter Century", National Geographic, <https://news.nationalgeographic.com/news/2014/04/140420-south-sudan-famine-africa-hunger-war-world/> (Diakses 20 April 2014).

⁴ Siemon Hollema, Andre Odera, et al. "How A New Country Can Feed Its People", (vam: food security analysis, Report on Food Security and Nutrition in South Sudan, 2012).

⁵ Henk-Jan Brinkman and Cullen S. Hendri, "Food Insecurity and Violent Conflict: Causes, Consequences, and Addressing the Challenges" (World Food Programme: Occasional Paper n° 24, 2011): 5-8.

Inggris di tahun 1924.⁶ Inggris pernah menguasai perpolitikan di Sudan Selatan; termasuk dalam pembuatan kebijakan pemerintahan Sudan. Inggris menciptakan isolasi atau pemisahan kebijakan pemerintah Sudan Utara dan Sudan Selatan. Sudan Utara; didominasi oleh penduduk dengan etnis Arab beragama Islam. Sementara, Sudan Selatan merupakan sebuah wilayah yang didominasi oleh etnis penduduk kulit hitam Afrika yang menganut Animisme dan Kristen.⁷ Sejak munculnya isolasi kebijakan dari Inggris, Sudan Selatan mengalami konflik berkepanjangan hingga saat ini.

Bukti yang dapat dilihat dari konflik berkepanjangan pada konflik internal di era sekarang di Sudan Selatan adalah adanya pertarungan antara tentara-tentara dari pihak pelindung Presiden dan mantan Wakil Presiden Sudan Selatan yang mewakili negara-negara tetangga. Pertarungan politik terjadi pada rezim Presiden Salva Kiir dan mantan Wakil Presiden pertama, Riek Machar, dan elite politik lainnya. Adapun pertarungan elite politik tersebut juga mendorong konfrontasi antar dua kelompok etnis besar di Sudan Selatan. Kelompok etnis dari Presiden Salva Kiir merupakan etnis Dinka. Sementara itu, kelompok etnis dari mantan Wakil Presiden, Riek Machar, merupakan etnis Nuer.⁸ Keberlangsungan perseteruan politik tersebut diindikasikan disebabkan karena partai-partai yang terlibat tidak memiliki kredibilitas. Tidak hanya itu, penandatanganan gencatan senjata tahun 2014 secara langsung juga menjadi peningkatan pemicu konflik

⁶ Abdul Rahman Abu Zayed Ahmed, *Why the violence?* (London: Panos Institute, 1988), 19.

⁷ Abdul Rahman Abu Zayed Ahmed, 19.

⁸ Radie Bareketaab, "Why South Sudan Conflict is Proving Intractable", *Nordiska Afrikainstitutet*, (Policy Note 4, 2015): 1-4.

yang menimbulkan berbagai macam aksi dan tindakan kekerasan dari berbagai suku dan komunitas di Sudan Selatan yang diperkuat oleh aksi militer.⁹

Konflik internal yang terjadi di Sudan Selatan telah menimbulkan banyak kerugian. Salah satu dampak atau kerugian dari konflik etnis politik tersebut adalah krisis pangan di Sudan Selatan. Tidak hanya itu, kerugian yang timbul dari konflik internal di Sudan Selatan juga telah menyebabkan ribuan orang meninggal, kelaparan, penyakit dan jatuhnya perekonomian nasional Sudan Selatan.¹⁰ Data menyebutkan bahwa sejak Desember 2013 dinyatakan terdapat sekitar 1.9 juta orang terancam tidak memiliki tempat tinggal dan harus mengungsi, 1.3 juta orang mengungsi ke negara-negara tetangga, dan hampir dari 5 juta orang mengalami krisis keamanan dalam pangan.¹¹ Tidak hanya itu, organisasi internasional seperti WFP dan FAO di tahun 2016, menyatakan bahwa terdapat sekitar 3.7 hingga 4 juta orang terancam krisis makanan.¹²

Dari ancaman krisis makanan tersebut, organisasi internasional yaitu Food and Agriculture Organization (FAO); yang khusus menangani masalah pangan, mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan krisis pangan di Sudan Selatan. FAO dirancang sebagai organisasi fungsional yang menyediakan pelayanan primer.¹³



⁹ Kate Almquist Knopf, "Ending South Sudan's Civil War", Council Special Report No.77, (Council on Foreign Relations, Center for Preventive Actions, November 2016), 8.

¹⁰ Salim Ahmed Salim, "South Sudan: The Cost of War "An estimation of the economic and Financial of ongoing conflict" (Frontier Economics, CPDS, Centre for Conflict Resolution, Uganda), 5.

¹¹Reliefweb, 2017 South Sudan Humanitarian Needs Overview, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, <https://reliefweb.int/report/south-sudan/2017-south-sudan-humanitarian-needs-overview> (Diakses 13 Februari 2017).

¹²Eddie Thomas and Natalia Chan, "The Crisis in South Sudan: South Sudan: Wrong turn at the Crossroads?" (Humanitarian Exchange, no.8, January 2017) :5.

¹³Food and Agriculture Organization (FAO), "The Term an Definition", (Food and Agriculture Organizations, 2010).

Keberadaan Food and Agriculture Organizations (FAO) dalam memberikan bantuan pangan di Sudan Selatan sudah berlangsung sejak krisis dimulai di Sudan Selatan. Akan tetapi, krisis pangan yang terjadi belum juga teratasi hingga saat ini. Terbukti bahwa tercatat 164 anak-anak meninggal disebabkan karena kelaparan dan terserang penyakit di antara bulan Januari dan September 2017.¹⁴ Disisi lain, *Integrated Food Security Phase Classification (IPC)*, menyebutkan bahwa sekitar 4.9 juta masyarakat Sudan Selatan atau lebih dari total populasi 40% penduduk di Sudan Selatan membutuhkan bantuan makanan, agrikultur, dan nutrisi yang mendesak.¹⁵

Permasalahan mengenai krisis pangan yang terjadi di Sudan Selatan masih belum dapat diselesaikan. Hal tersebut disebabkan oleh hambatan dari pemerintahan Sudan Selatan terhadap penyaluran bantuan krisis pangan untuk Sudan Selatan. Tercatat bahwa pada tanggal 3 Februari 2014, bantuan dari FAO, dihalangi oleh pemerintah Sudan Selatan.¹⁶

Beberapa bukti dari bentuk hambatan atau halangan tersebut adalah tindakan dari pemerintahan Presiden Salva Kiir, pemerintahan dari pihak Presiden Sudan Selatan, membatasi pemberian bantuan FAO terhadap beberapa daerah di Sudan Selatan. Hal tersebut terlihat ketika adanya kampanye militer yang diciptakan oleh pemerintah di bagian arah Utara-Selatan dari kota Wau dan

¹⁴ Michelle Nichols, "Exclusive: South Sudan's government using food as weapon of war-U.N. report, (REUTERS), <https://www.reuters.com/article/us-southsudan-security-un-exclusive/exclusive-south-sudans-government-using-food-as-weapon-of-war-u-n-report-idUSKBN1DA2OX> (Diakses November, 2017).

¹⁵ IPC, "Key IPC Finding: September 2017- March 2018", *Integrated Food Security Phase Classification The Republic of South Sudan*, <https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-key-ipc-findings-september-2018-march-2019> (Diakses 28 September 2018)

¹⁶ Carlo Koos dan Thea Gutsche, "South Sudan's Newest War: When Two Old Men Devide a Nation" (GIGA Focus: German Institute of Global and Area Studies,2014): 6.

beberapa daerah di bagian barat dari Bahr el-Ghazal.¹⁷ Tidak hanya itu, distribusi bantuan makanan ke Sudan Selatan ditahan oleh pemerintahan pusat dan hanya mengijinkan pendistribusian makanan di daerah-daerah tersebut asalkan mendapatkan pengawasan yang ketat.¹⁸ Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya sebanyak 80 hingga 100 tentara mengawasi markas atau *camp* dari pekerja bantuan kemanusiaan (*aid workers*).¹⁹ Selain terhambatnya distribusi bantuan makanan di Sudan Selatan, pekerja bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan (*aid workers*) mengalami kekerasan dan bahkan menyebabkan kematian. Sejak konflik internal di Sudan Selatan, sudah sebanyak 82 pekerja terbunuh.²⁰ Sehingga FAO pernah memutuskan untuk menarik pekerjaanya di tahun 2014.²¹

Berdasarkan kejadian tersebut, pemerintah Sudan Selatan yang semestinya harus turut menjamin kemakmuran dan keamanan seluruh warga negaranya, justru menghalangi bantuan yang akan diberikan. Tindakan tersebut bertolak belakang dengan fungsi negara seperti seharusnya. Adapun menurut Plato, di dalam bukunya *Republic*, menjelaskan bahwa negara bertujuan untuk memenuhi dan menjamin kehidupan manusia. Sementara, menurut Aristoteles menyatakan bahwa negara bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan yang baik bagi warga negaranya.²²

¹⁷ Michelle Nichols, Exclusive: South Sudan's government using food as weapon of war-UN Report, (Diakses 11 November 2017).

¹⁸ Akshaya Kumar, "Aid as a Weapon of War in Sudan: One More Reason to Adopt a Comprehensive Approach", (Oktober 2013), 1.

¹⁹ Harriet Grant, "Attacks on Aid Workers in South Sudan: There was incredible naivety", The Guardian, <https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/oct/17/attack-on-aid-workers-in-south-sudan-there-was-incredible-naivety> (Diakses Oktober 2016).

²⁰ Umberto Bacchi, "U.N. Agency pulls staff from parts of South Sudan due safety fears", REUTERS, <https://www.reuters.com/article/us-southsudan-violence-aid/u-n-agency-pulls-staff-from-parts-of-south-sudan-due-safety-fears-idUSKBN17M2B2> (Diakses April, 2017).

²¹ Umberto Bacchi, (2017).

²² Henk E.S. Woldring, *On the Purpose of the State: Continuity and Change in Political Theories, (The Failure of Modernity, The Cartesian Legacy and Contemporary Pluralism, 1999)*, 155-170.

Fungsi negara yang sebagaimana mestinya tersebut dinilai bertolak belakang dengan fungsi dan tujuan Sudan Selatan sebagai negara dalam menghadapi krisis pangan yang menjadi masalah serius di Sudan Selatan. Hal itu dapat dilihat bahwa Sudan Selatan tidak dapat menyelenggarakan kehidupan yang baik bagi warga negaranya, khususnya di bidang keamanan. Oleh sebab itu, peneliti akan menganalisis alasan dari tindakan pemerintah Sudan Selatan menghalangi bantuan FAO terhadap penanganan krisis pangan di Sudan Selatan di tahun 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Sudan Selatan merupakan salah satu negara yang sedang mengalami konflik dan krisis yang perlu diatasi. Dampak yang ditimbulkan dari konflik internal di Sudan Selatan adalah seperti kelaparan, krisis pangan dan malnutrisi terhadap anak-anak. Sudan Selatan dinilai sebaiknya masih membutuhkan bantuan kemanusiaan dalam mengalami krisis pangan. Food and Agriculture Organization (FAO), sebagai organisasi internasional yang bertugas untuk mengatasi masalah krisis pangan tersebut diharapkan mampu mengurangi dan menghentikan krisis pangan di Sudan Selatan.

Akan tetapi, bantuan untuk mengatasi krisis pangan di Sudan Selatan mengalami hambatan terhadap pendistribusian makanan di beberapa daerah di Sudan Selatan di tahun 2014. Sementara, jumlah warga terutama anak-anak di Sudan Selatan; telah memperoleh dampak kerugian; yaitu kematian, kelaparan dan penyakit. Adapun tindakan hambatan terhadap bantuan dari FAO yang dilakukan oleh pemerintah Sudan Selatan dinilai bertolak belakang dengan tujuan dan fungsi negara seperti seharusnya, seperti menciptakan dan menyelenggarakan

kehidupan yang baik bagi warga negaranya baik di dalam kemakmuran, keamanan, ketertiban, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menjelaskan alasan tindakan pemerintahan Sudan Selatan menghalangi bantuan dari Food and Agriculture Organization (FAO) terhadap krisis pangan di tahun 2014.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Mengapa pemerintah Sudan Selatan bertindak menghalangi bantuan Food and Agriculture Organization (FAO) terhadap krisis pangan di Sudan Selatan di tahun 2014?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan tindakan pemerintah Sudan Selatan menghalangi bantuan dari Food and Agriculture Organization (FAO) terhadap krisis pangan di Sudan Selatan di tahun 2014.

1.5 Manfaat Penelitian

- Penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi lingkungan akademis dan masyarakat internasional terhadap permasalahan krisis pangan di dunia.
- Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), ataupun organisasi internasional non pemerintah untuk sebagai gambaran isu untuk menemukan strategi dalam menangani permasalahan krisis pangan apabila terdapat hambatan yang dimungkinkan muncul dari pemerintahan negara yang bersangkutan.



- Penelitian ini dapat menjadi instrumen dan metode bagi cara berpikir dan analisis pembaca untuk menambah pengetahuan terhadap adanya faktor internal dan faktor eksternal dari permasalahan krisis pangan.

1.6 Studi Pustaka

Tinjauan pustaka berikut akan menjadi landasan peneliti dalam menemukan batasan masalah dari tulisan-tulisan yang pernah dibuat sebelumnya dari kesamaan topik penelitian yang dibahas.

Pustaka pertama adalah tulisan dari Simeon Maile yang berjudul *The Escalating Food Crisis in South Africa*.²³ Pustaka ini menjelaskan bahwa krisis pangan disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya ketidakmampuan pemerintah dalam merancang kerangka kebijakan. Tidak hanya itu, pustaka ini juga menjelaskan bahwa kurangnya ketersediaan pangan hingga mengancam krisis pangan di banyak negara bukan merupakan salah satu kejadian alami yang begitu saja terjadi, namun diidentifikasi terdapat penyebab-penyebab yang disengaja, yakni kebijakan domestik yang didorong oleh kontroversi agresif. Salah satu kasusnya adalah permasalahan peningkatan kasus krisis pangan di Afrika Selatan yang masih belum dapat diatasi. Adapun penyebabnya diidentifikasi dikarenakan kebijakan domestik atau nasional Afrika Selatan yang didukung dan dipengaruhi oleh tekanan kuat dari kelompok-kelompok tertentu yang diindikasikan memperoleh keuntungan dari apartheid. Berbeda dengan penelitian peneliti, peneliti berfokus kepada permasalahan krisis pangan di Sudan Selatan dan mengidentifikasi penyebab krisis pangan di Sudan Selatan yang dipengaruhi oleh

²³ Simeon Maile, *The Escalating Food Crisis in South Africa*, *International Journal of Applied Science and Technology* 4, No.2, (March 2014): 73-85.

konflik internal serta meneliti alasan dari tindakan pemerintah Sudan Selatan yang menghambat bantuan krisis pangan dari pihak eksternal, yakni FAO.

Pustaka kedua adalah sebuah artikel karya Lauren Ploch Blanchard, yang berjudul *“The Crisis in South Sudan”*.²⁴ Artikel ini menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan konflik politik antar pemerintah dari suatu rezim pemimpin politik di Sudan Selatan. Adanya perlawanan politik yang menimbulkan krisis berkepanjangan di Sudan Selatan; tidak hanya disebabkan oleh identitas suatu suku, namun diinisiasi tumpang tindih dari kegagalan terhadap pemberian batasan antara suku dan politik. Konflik etnis politik tersebut memicu perlawanan senjata hingga pembunuhan etnis; yang ditargetkan di ibu kota negara Sudan Selatan, yaitu Juba. Konflik tersebut juga menimbulkan ketidakamanan yang menciptakan krisis kemanusiaan, sehingga menggambarkan konflik tersebut sebagai bentuk dari perang sipil.

Di sisi lain, konflik politik etnis yang terjadi di Sudan Selatan mendapatkan tanggapan dari komunitas internasional dalam mewujudkan perdamaian dunia. Adapun bentuk dari perwujudan tersebut seperti melindungi penduduk yang menjadi korban dari konflik dan berusaha memfasilitasi negara yang ditujukan untuk mengurangi perang atau konflik kekerasan di negara tersebut. Dari data disebutkan bahwa telah banyak negara-negara di dunia dan agensi-agensis pemberi bantuan lainnya menanggapi dan membantu meminimalisir tingkat konflik dan krisis di Sudan Selatan. Namun, terkadang, negara-negara dan agen-agen tersebut juga mendapatkan kendala, seperti contoh pada tanggal 21 Desember 2013, terdapat empat personil dari negara Amerika Serikat di dalam

²⁴ Lauren Ploch Blanchard, *“The Crisis in South Sudan”*, (Congressional Research Service, 2015).

perwujudan misi *peacekeeping* di Sudan Selatan terluka selama beroperasi. Adapun perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh Lauren Ploch Blanchard dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan isu krisis yang lebih spesifik yaitu krisis pangan. Tidak hanya itu, peneliti juga berfokus kepada salah satu agensi pemberi bantuan dari organisasi internasional, yakni FAO.

Pustaka ketiga adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Karlo Koos dan Thea Gutscke, yang berjudul “*South Sudan’s Newest War: When Two Old Men Divide a Nation*”.²⁵ Artikel jurnal ini menjelaskan tentang sebuah pertarungan kekuatan politik Sudan Selatan antara dua tokoh politik yakni Presiden Salva Kiir dan mantan Wakil Presiden, Riek Machar; yang menimbulkan konflik kekerasan antar suku hingga melibatkan fraksi tentara pada bulan Desember 2013. Adapun konflik antar suku dari kedua belah pihak yang terlibat yakni Presiden Kiir dari suku Dinka dan oposisinya, Riek Machar dari suku Nuer. Hal tersebut menimbulkan ketidakstabilan politik di Sudan Selatan.

Di samping itu, Sudan Selatan diidentifikasi mengalami krisis sejak konflik internal politik. Dari konflik tersebut telah mengakibatkan lebih dari 10.000 orang terbunuh dan lebih dari jutaan orang lainnya tidak memiliki standar kehidupan yang layak, serta diestimasikan bahwa sepertiga dari populasi di Sudan Selatan berisiko mengalami krisis keamanan pada pangan.

Di sisi lain, Sudan Selatan mendapat banyak respon dari dunia internasional dari konflik pertarungan politik pemerintahan Sudan Selatan tersebut. Adapun pihak-pihak yang berusaha mengurangi konflik dan memberikan bantuan bagi Sudan Selatan adalah seperti negara Tiongkok, Amerika Serikat,

²⁵ Karlo Koos dan Thea Gutscke, *South Sudan’s Newest War: When Two Old Men Divide a Nation*, Number 2, (German Institute of Global and Area Studies (GIGA Focus, 2014).

serta organisasi internasional seperti agen-agen dari UN (United Nations) ataupun organisasi-organisasi non pemerintah internasional (INGOs). Akan tetapi, pada tanggal 3 Februari 2014, bantuan dari UN dihalangi oleh pemerintah Sudan Selatan. Tidak hanya distribusi bantuan pokok, namun juga menghambat aksi UN melalui laporan media negatif, demonstrasi anti UN serta terdapat pelecehan terhadap pegawai UN.

Dari penelitian yang ditulis oleh Karlo Koos dan Thea Gutscke tersebut, tidak dijelaskan mengenai alasan pemerintah Sudan Selatan menghalangi atau menghambat bantuan dari berbagai negara dan agensi-agensi organisasi internasional. Oleh sebab itu, di dalam penelitian “Analisis Tindakan Pemerintah Sudan Selatan Menghalangi Bantuan FAO terhadap Krisis Pangan di Tahun 2014”, peneliti berfokus untuk menganalisis tindakan pemerintah Sudan Selatan menghalangi bantuan internasional dalam menangani permasalahan krisis pangan.

Pustaka keempat adalah jurnal dari Johan Broshe dan Kristine Hoglund, yang berjudul *Crisis of Governance in South Sudan: Electoral Politics and Violence In The World's Newest Nation*.²⁶ Jurnal tersebut menjelaskan kekerasan yang terjadi di Sudan Selatan sejak perang Utara-Selatan (*North-South*).

Penelitian di jurnal tersebut lebih berfokus kepada strategi *state-building* dan *peace-building* dengan menggabungkan pengukuran dari tingkat kekerasan yang berhubungan dari tiga aktor yang terlibat. Seperti pertama, “*stakes*” atau pelaku yang ada di pemerintahan memiliki keterlibatan yang sangat berpengaruh terhadap keamanan dan kestabilan politik dan perekonomian. Kedua, aktor yang terlibat dalam politik didominasi oleh individu-individu yang juga memegang

²⁶ Johan Broshe dan Kristine Hoglund, “Crisis of Governance in South Sudan: Electoral Politics and Violence in the World's Newest Nation.”, *The Journal of Modern African Studies* 54, no. 1 (2016): 67–90.

kekuasaan serta posisi di kelompok pemberontak (*rebel groups*), dapat menimbulkan resiko tinggi dan menciptakan kekerasan politik dari adanya perbedaan sudut pandang perpolitikan. Ketiga adalah institusi, yang dinilai sangat penting untuk membantu melegitimasi proses elektoral politik dan dinilai dapat mencegah kekerasan atau konflik.

Sumber pustaka ini menjadi acuan bagi peneliti bahwa penyebab krisis pangan di Sudan Selatan disebabkan oleh adanya konflik internal politik, yakni adanya krisis pemerintahan di Sudan Selatan. Berbeda dengan penelitian peneliti, pustaka tersebut berfokus kepada deskripsi cara pemulihan krisis di Sudan Selatan melalui *state-buiding* dan *peace-buiding*. Sementara, peneliti berfokus kepada analisis tindakan atau perilaku dari pemerintahan Sudan Selatan yang menghalangi bantuan internasional dalam penanganan krisis pangan di Sudan Selatan.

Sumber pustaka terakhir yaitu jurnal yang ditulis oleh Cristopher Zambakari yang berjudul *South Sudan: Institutional legacy of colonialism and the making of new state*.²⁷ Jurnal tersebut memaparkan mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi Sudan Selatan dalam membangun negara dari pengalaman sebagai negara yang pernah dijajah.

Disisi lain, jurnal tersebut menggunakan kerangka kerja (*framework*), yakni “*New Sudan*” sebagai sebuah model alternatif dan penyelesaian dari permasalahan warisan kolonialisme yang membentuk perilaku Sudan Selatan dalam perpolitikan dan etnisitas, penyelenggaraan sistem dualisme di dalam pemerintahan, dan bifurkasi antara sipil dan hukum adat.

²⁷ Cristopher Zambakari, “South Sudan: Institutional Legacy of Colonialism and The Making of New State”, *The Journal of North African Studies*, volume 17, issue 3, 2012.

Penelitian dari pustaka tersebut lebih berfokus kepada cara membangun kembali Sudan Selatan pasca kolonialisasi dengan kerangka “*New Sudan*”. Sementara, di dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan “post-kolonialisme”, yang lebih berfokus terhadap analisis dari tindakan pemerintah Sudan Selatan secara lebih mendalam dimana diidentifikasi ada unsur warisan kolonial yang ditinggalkan dan sangat mempengaruhi kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Sudan Selatan.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Bantuan Internasional

Bantuan internasional sering diartikan sebagai bentuk dari uang, barang, ataupun pelayanan yang diberikan oleh pendonor, (baik itu melalui negara, institusi, ataupun privat) kepada penerima bantuan internasional (seperti, negara) dari suatu kondisi atau situasi yang mengharuskan negara tersebut harus menerima bantuan. Negara-negara penerima donor memiliki motivasi tertentu dalam menerima bantuan. Adapun diantaranya adalah adanya unsur politis dari bantuan luar negeri adalah dapat memberikan keuntungan politis lebih besar kepada suatu negara dalam mempertahankan kekuasaan ataupun menekan pihak oposisi atau lawan.²⁸

Di samping itu, menurut Todaro (1989), negara-negara berkembang cenderung menerima bantuan luar negeri dikarenakan dengan adanya suatu proposisi bahwa bantuan asing merupakan sebagai unsur yang sangat penting dan krusial dalam proses pembangunan di suatu negara. Akan tetapi, pembangunan

²⁸Subhayu Bandyopadhyay and E. Katarina Vermann, “Donor Motives for Foreign Aid” (The Federal Reserve Bank of St. Louis, 2013): 332-334.

sebuah negara dari bantuan internasional juga harus didorong dengan dukungan dari pemerintahan dalam negeri.

Bantuan internasional menurut pendekatan post-kolonialisme didasarkan atas pengaruh warisan koloni yang membentuk suatu pemerintahan di suatu negara dalam menentukan keputusan. Di samping itu, post-kolonialisme memandang bahwa apabila sebuah negara memiliki sistem pemerintahan yang buruk, seperti pemerintahan yang diktator atau tirani, pengembangan di negara tersebut sulit direalisasikan yang menyebabkan kondisi suatu negara bertambah buruk.²⁹

1.7.2 Post-Kolonialisme

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai mengapa pemerintah menghalangi bantuan Food and Agriculture Organization (FAO) terhadap krisis pangan di Sudan Selatan, penelitian ini menggunakan pendekatan post-kolonialisme. Post-kolonialisme dipahami sebagai perspektif atau pendekatan untuk menjelaskan situasi tertentu pasca kolonialisme di suatu wilayah atau negara. Situasi tersebut dapat berupa sebuah bentuk pengaruh dari masa kolonisasi yang dapat bersinggungan dengan politik dan budaya di negara yang pernah mengalami penjajahan. Tidak hanya itu, pendekatan post kolonialisme dibentuk berdasarkan kritik dari historis sosial (*social histories*), perbedaan kebudayaan (*cultural differences*), dan praktikal diskriminasi politik (*political discrimination*).³⁰

Menurut John Lye, dalam bukunya *Contemporary Literary Theory*, menjelaskan mengenai post-kolonialisme, merujuk kepada sebuah bentuk cara

²⁹ (Meredith, 2005:368)

³⁰ Rukundwa and Aarde, "The Formation of Postcolonial Theory", di dalam I.R Akurugoda, NGOs Politic in Sri Lanka, Chapter 2, NGOs and Their Potential in Post-Colonial Societies, (Springer: Local Government and Development),10, <http://www.springer.com/978-3-319-58585-7>

khusus dari negara-negara koloni terhadap negara jajahannya dalam mendistorsikan budaya-budaya, pengalaman dan realita serta merujuk kepada penanaman identitas terhadap negara melalui bahasa, *image*, latar belakang, dan tradisi.³¹ Tidak hanya itu, menurut Maria Eriksson Baaz, di dalam bukunya *The Paternalism of Partnership: A Postcolonial Reading of Identity in Development Aid*, menjelaskan bahwa suatu negara diidentifikasi menerima bantuan dari pihak eksternal didasarkan dengan adanya suatu “*situating identity*” yang menjadi keputusan negara penerima bantuan. Adapun *situating identity* digambarkan sebagai bentuk identitas pendonor melalui manifestasi dari praktikal-praktikal perkembangan bantuan yang memutuskan suatu negara yang ditujukan untuk menerima, menghalangi ataupun menolak bantuan.³² Sementara itu, menurut Homi Bhabha, dalam artikelnya, *in Greenblatt and Gun’s Redrawing the Boundaries*, menyatakan pengaruh post-kolonialisme diakarkan pada historis khusus dari adanya pergantian atau perubahan dari budaya.³³

Pengaruh dari kolonialisme; memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Di samping itu, terutama di negara-negara di benua Afrika, khususnya Sudan Selatan, kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di Sudan Selatan dinilai merupakan hasil warisan yang dibuat di dalam bentuk kebiasaan dan kebijakan pada masa periode kolonialisasi di Sudan Selatan.³⁴

³¹ John Lye, “Contemporary Literary Theory”, https://brocku.ca/english/courses/2P70/contemporary_literary_theory.rtf

³² Maria Eriksson Baaz, “The Paternalism of Partnership: A Postcolonial Reading of Identity in Development Aid”, (Zeed Books, 2005) : 72-73.

³³ Datta G. Sawant, “Perspective on Post-Colonial Theory: Said, Spivak and Babha”, (Senagon: TACs College, 2015), 4-5.

³⁴ Joy Asongzoh Alemazun, “Post-Colonial Colonialism: An Analysis of International Factors and Actors Marring African Socio-Economic and Political Development”, *The Journal of Pan African Studies* 3, no.10, September 2010) : 63.

1.7.3. Warisan Kolonial (*Colonial Legacy*) dan Dampak dari Warisan Kolonial

Peninggalan kolonial atau warisan kolonial sangat erat dengan keberlangsungan pola kehidupan bekas negara kolonial hingga era kontemporer. Tidak hanya itu, karakter egois dan sifat eksploitatif dari para koloni mempengaruhi dan membentuk karakter pemerintahan.³⁵ Beberapa warisan kolonial diidentifikasi membentuk perilaku pemerintahan diantaranya disebabkan oleh administrasi pemerintahan, transformasi relasi produksi, serta pembagian-pembagian etnis yang menimbulkan persaingan dan perseteruan.³⁶ Adapun warisan kolonial dan dampak dari warisan kolonial di Sudan Selatan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pembagian Etnis (*Ethnic Division*)

Bentuk warisan kolonial yang memunculkan pembagian etnis dimulai sejak koloni mencakup beberapa kelompok etnis di dalam batas-batas teritorial kolonial. Selain itu, para koloni tidak memperhatikan batas-batas kelompok etnis yang ada di wilayah atau teritorial tersebut.³⁷ Adapun faktor-faktor dari pembagian etnis dinilai merupakan bentuk polarisasi masyarakat etnis yang ditinggalkan kolonial yang dulunya para koloni membagi kebudayaan serta mengabaikan adanya perbedaan budaya selama pembuatan batas-batas negara.³⁸

Pembagian etnis kerap menghancurkan integrasi stratifikasi etnis. Menurut Bates dan Olzak, hal tersebut dinilai karena pembagian etnis menimbulkan pola-

³⁵ JoyAsongazohAlemazung, 65

³⁶ JoyAsongazohAlemazung, 65

³⁷ Robert Blanton, T. David and Brian Athow." Colonial Style and Colonial Legacies: Trade patterns in British and French Africa". Journal of Peace research, 38, no.4, 2001, pp.473-491. Sage Publications (London, Thousand Oaks, CA and New Delhi), (September 2002): 476

³⁸ JoyAsongazohAlemazung, 65-66.

pola “*competitive ethnicity*” atau persaingan antar etnis, yang menyebabkan kelompok-kelompok etnis yang berlawanan hingga dapat menciptakan status hirarki.³⁹

Dengan adanya pembagian etnis yang memunculkan struktur hirarki, tidak jarang secara langsung menciptakan partai-partai di sepanjang garis etnis. Selain itu, partai-partai etnis diidentifikasi dapat membentuk sebuah marginalisasi yang dapat menjadi pihak oposisi terhadap suatu pemilihan dari pihak-pihak partai yang berkuasa. Akibatnya, pembagian etnis di dalam partai juga kerap menjadi penyebab dari konflik internal yang terjadi di negara-negara kolonial, seperti di negara-negara Ethiopia di Afrika.

Di negara kolonial, kelompok etnis yang dipolitisasi akan menciptakan institusi, kebijakan, dan rancangan yang bertujuan untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik mereka. Sementara, kelompok etnis yang terdepolitisasi akan meminimalkan perpecahan etnis.⁴⁰

Selain itu, terciptanya bentuk hegemoni politik etnis sebelum kemerdekaan di negara kolonial, dianggap mengarah dan membentuk kepada warisan institusional dari etnisitas yang digunakan sebagai instrumen politik yang diskriminatif menjadi semakin terabaikan. Oleh sebab itu, apabila etnisitas didasarkan terhadap politisasi selama pemerintahan kolonial, maka penghargaan terhadap hak minoritas kurang. Hal tersebut dikarenakan bukan hanya karena etnisitas merupakan sebagai salah satu penyebab dari perpecahan politik yang utama, melainkan juga karena etnisitas kerap ditempatkan ke dalam hubungan

³⁹ Joy Asongzoh Alemazung, 66.

⁴⁰ Tom Brower, “Reframing Kurtz’s Painting: Colonial Legacies and Minority Rights in Ethnically Divided Societies”, *Duke Journal of Comparative and International Law* 27, no. 35 (2016): 55.

kekuasaan politik yang asimetris.⁴¹ Sehingga, hal ini dinyatakan bahwa mayoritas etnis yang berkuasa dinilai kurang menghormati hak-hak minoritas dan lebih mementingkan kepentingan kelompok etnis.

b. Transformasi Relasi Produksi (*Transformation of Productive Relations*)

Peninggalan atau warisan koloni lain adalah perubahan atau transformasi pola hubungan produksi warga negara kolonial. Tidak hanya itu, transformasi terhadap pola produktif tersebut menciptakan kerusakan terhadap bentuk pola struktur organisasi dan otoritas sosial.

Perubahan atau transformasi terhadap produksi diidentifikasi muncul sejak masa revolusi industri. Pada masa revolusi industri, negara-negara Eropa memiliki kebutuhan untuk melengkapi permintaan (*demand*) bahan-bahan mentah seperti terhadap tanaman kelapa sawit, minyak tanah dan kapas; yang dibutuhkan sebagai *input* produksi untuk industri tertentu.⁴² Selain itu, menurut Young, di abad ke-19, terjadi peningkatan pendapatan di kalangan kelas pekerja industri Eropa yang menghasilkan peningkatan terhadap permintaan produksi pertanian seperti tanaman pangan yakni kopi, teh, kakao, dan gula.⁴³

Untuk memenuhi peningkatan permintaan produksi tersebut, para koloni menggunakan kekuasaannya atau *power* untuk memaksa penduduk pribumi dalam produksi tanaman pangan. Selain itu, kemunculan lembaga-lembaga kontrol sosial dan organisasi sosial yang telah berevolusi berabad-abad yang disesuaikan

⁴¹ Tom Brower, 55.

⁴² JoyAsongazohAlemazung, 67-68.

⁴³ Robert Blanton, T. David and Brian Athow." Colonial Style and Colonial Legacies: Trade patterns in British and French Africa". *Journal of Peace research* 38, no.4, (2001): 473-491.

berdasarkan kebutuhan lokal, pasar lokal, dan komunitas lokal terganggu ketika basis pola produksi masyarakat diubah untuk melayani permintaan pasar Eropa.

Selain proses melalui pemenuhan produksi agrikultur, transformasi produksi dipengaruhi oleh administrasi di bawah kontrol koloni. Pemerintahan di negara-negara Afrika, secara mayoritas merupakan warisan kolonial yang dipengaruhi dari sistem administrasi kolonial negara Prancis dan Inggris. Sistem administrasi koloni Prancis berfokus kepada penyatuan warga negara koloni ke dalam “*Greater France*” melalui asimiliasi budaya dan administrasi pusat (*administrative centralization*).⁴⁴ Adapun maksud dari *administrative centralization* tersebut adalah agen dari negara koloni mengganti kewenangan dan institusi tradisional ke dalam bentuk birokrasi negara koloni.⁴⁵

Sementara, menurut (Emerson, 1962), sistem administrasi Inggris didasarkan pada pengaruh elite lokal dalam menangani urusan-urusan koloni. Seperti, di dalam institusi sosial pra-kolonial, Inggris menggunakan dan mempraktikkan strategi “*divide and rule*” atau “membagi dan memerintah”. Strategi tersebut dapat dilihat dari sistem administrasi dibawah kontrol Inggris berfokus untuk mempertahankan persaingan oposisi para faksi antar komunitas etnis yang berbeda di dalam koloni.⁴⁶ Tidak hanya itu, praktik dari strategi *divide and rule* tersebut menunjukkan adanya perubahan terhadap tatanan kekuasaan administrasi dibawah pengaruh kontrol koloni dimana etnisitas tidak hanya diartikan sebagai sebuah bentuk perkumpulan antar etnis.⁴⁷

⁴⁴ Robert Blanton, T. David and Brian Athow, 478.

⁴⁵ Robert Blanton, T. David and Brian Athow, 478.

⁴⁶ Robert Blanton, T. David and Brian Athow, 480.

⁴⁷ JoyAsongazohAlemazung, 67.

Pembagian etnis dan transformasi relasi produksi diidentifikasi sebagai sebuah bentuk peninggalan atau warisan dari adanya pengaruh kekuasaan yang kuat dari koloni yang tidak mementingkan hak-hak minoritas. Hal tersebut dinilai bahwa kerap memunculkan adanya dominasi pada suatu kelompok etnis, sehingga menyebabkan kelompok lain termarginalisasikan. Tidak hanya itu, ketimpangan terhadap hak-hak minoritas tersebut diidentifikasi menciptakan kekuasaan politik yang asimetris bagi kelompok etnis mayoritas.

1.7.4. Hak-Hak Minoritas (*Minority Rights*)

Menurut Francesco Capotorti, pendiri dari *Special Rapporteur of United Nations*, *minority* atau minoritas merupakan sekelompok populasi yang tidak memiliki posisi dominan di satu negara yang biasanya didasarkan atas kelompok etnis, agama ataupun bahasa (*linguistic*) yang berbeda.⁴⁸ Sehingga hal tersebut mempengaruhi tingkat solidaritas kebudayaan, tradisi, agama, maupun bahasa antar masyarakat. Tidak hanya itu, hal tersebut juga akan memunculkan ketimpangan terhadap perolehan hak sebagaimana semestinya. Hak Minoritas atau "*Minority Rights*" dikonsepsikan sebagai sebuah bentuk kelompok yang tidak dominan di dalam masyarakat yang kurang memperoleh status tidak lebih kurang (*less-than-half*) dari total populasi di suatu teritorial tertentu.⁴⁹ Selain itu, hak untuk tetap berbeda juga merupakan sebuah bagian utama yang diinginkan dari hak minoritas.⁵⁰

⁴⁸ Dieter Kugelmann, "The Protection of Minorities", Max Planck Yearbook of United Nations Law, 11 (2007) : 223-263.

⁴⁹ Joec R.Pruce, "Introduction: Minority Rights", Human rights and Humanitarian Welfare, 3-4.

⁵⁰ Jeremy Gilbert, "Constitutionalism, Ethnicity, and Minority Rights in Africa: A legal appraisal from the Great Lakes region" (Oxford University Press and New York Universit School Law, 2013), 416.

Berdasarkan definisi dari kelompok dan hak minoritas tersebut, kelompok minoritas dinilai memiliki keinginan yang sama untuk melestarikan dan menikmati budaya sendiri serta memiliki hak untuk berpartisipasi dan memiliki kesetaraan di dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, hak minoritas juga kerap dikaitkan dengan terciptanya diskriminasi hak di dalam kelompok masyarakat.

Pada masa periode pasca-kolonial, terdapat berbagai paradigma atau pandangan mengenai hak-hak minoritas, terutama terhadap pengakuan kelompok etnis. Pertama, mengakui adanya posisi dominan yang dipegang atau dikuasai oleh kelompok tertentu sehingga mengidentifikasi terciptanya karakter negara yang baru dengan asumsi budaya, ekonomi, maupun keunggulan sosial. Kedua, mengakui adanya bentuk peralihan kemitraan etnis secara langsung yang disertai oleh redistribusi kekuasaan yang drastis.⁵¹

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode atau pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang berusaha untuk mengkonstruksi realitas dan menekankan pada kedalaman makna ataupun data bukan perluasan data. Di samping itu, metode kualitatif menggunakan bahasa-bahasa penelitian yang berbentuk deskriptif serta bersifat formal dan impersonal melalui angka atau data statistik.⁵²

⁵¹ Tom Brower, 54.

⁵² Merriam, di dalam Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", Makara, Sosial Humaniora 9, No. 2, (Desember 2005), 57-65, (Universitas Indonesia: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), 13.

Adapun metode ini dirancang dengan menggunakan penelitian berjenis eksplanatif analisis. Penelitian berjenis eksplanatif analisis yaitu penelitian yang berfokus menganalisis keterkaitan atau pengaruh antar variabel dalam mengkaji suatu isu atau fenomena secara lebih mendalam dan terperinci.⁵³ Di dalam penelitian ini, peneliti berfokus untuk menjelaskan tindakan pemerintah Sudan Selatan melakukan hambatan atau halangan terhadap bantuan FAO dalam menangani krisis pangan di Sudan Selatan di tahun 2014.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan waktu penelitian yang digunakan dalam “Analisis Tindakan Pemerintah Sudan Selatan Menghalangi Bantuan Food and Agriculture Organization (FAO) terhadap Krisis Pangan di Sudan Selatan” adalah di tahun 2014. Adapun tahun 2014 merupakan tahun yang mana FAO mulai mendapatkan hambatan dari Sudan Selatan terhadap penyaluran bantuan FAO di beberapa daerah di Sudan Selatan. Tidak hanya itu, penelitian ini juga akan menggunakan konsep post-kolonialisme dan membahas dinamika program-program yang telah dilakukan FAO terhadap Sudan Selatan dalam jangka batasan waktu sejak FAO mulai menjalankan operasi bantuan di Sudan Selatan.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau dapat disebut sebagai variabel dependen; merupakan objek yang akan dianalisis atau dijelaskan dalam sebuah penelitian.⁵⁴ Sedangkan unit eksplanasi atau sebagai variabel independen, merupakan unit yang

⁵³ Rachmat Kriyantono, “Teknik Praktis Riset Komunikasi” (Malang: Kencana Prenada Media Group.2009), 59-60.

⁵⁴ Laura Roselle, dan Sharon Spray, “Research and Writing in International Relations” (London: Longman Pearson, 2008), 11-12.

mempengaruhi perilaku dari unit analisis.⁵⁵ Berdasarkan penelitian “Analisis Tindakan Pemerintah Sudan Selatan Menghalangi Bantuan Food and Agriculture Organization (FAO) Terhadap Krisis Pangan di Sudan Selatan di tahun 2014”; maka, unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Sudan Selatan. Sementara, unit eksplanasi dari penelitian ini adalah bantuan FAO terhadap krisis pangan di Sudan Selatan.

Tingkat analisis atau level analisis merupakan acuan posisi dari unit yang akan diteliti.⁵⁶ Menurut Mochtar Mas'ood, tingkat atau level analisis dibagi menjadi lima yaitu individu (menganalisis perilaku dari tokoh individu yang mempengaruhi suatu keputusan melalui persepsi, kepribadian, atau tingkah laku, seperti presiden dan kepala pemerintahan); kelompok (menganalisis perilaku kelompok di dalam hubungan internasional, seperti organisasi internasional); negara-bangsa (menganalisis tentang interaksi dan dinamika proses pembuatan keputusan suatu negara di dalam hubungan internasional); pengelompokan negara-negara atau regional (menganalisis adanya interaksi antar-negara yang berupa seperti aliansi, persekutuan perdagangan, dan lain-lain) dan sistem internasional (menganalisis suatu fenomena atau dinamika perilaku aktor di dalam sistem internasional, seperti hukum internasional).⁵⁷

Penelitian yang berjudul “Analisis Tindakan Pemerintah Sudan Selatan Menghalangi Bantuan Food and Agriculture Organizations (FAO) terhadap Krisis Pangan di Sudan Selatan di Tahun 2014” menggunakan level analisis atau tingkat analisis yaitu negara. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini lebih berfokus

⁵⁵ Laura Roselle, 12.

⁵⁶ Mochtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi, (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1990), 35-286.

⁵⁷ Mochtar Mas'ood, (1990).

kepada analisis dari perilaku suatu negara yaitu analisis tindakan dari pemerintah Sudan Selatan yang bertindak menghalangi bantuan FAO terhadap krisis pangan di tahun 2014.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *secondary data*; yakni mengambil dan menganalisis dari data-data yang telah ada sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Adapun cara pengumpulan data dari penelitian ini yaitu dengan mencari data-data melalui studi kepustakaan (*library research*); seperti buku, jurnal, artikel, buku dan jurnal online, situs resmi, arsip pemerintahan, dan dokumen-dokumen resmi negara ataupun organisasi internasional seperti FAO.

Sebelum menganalisis tindakan pemerintah Sudan Selatan menghalangi bantuan FAO terhadap krisis pangan di tahun 2014, peneliti mencari data penyebab terjadinya krisis pangan di Sudan Selatan. Adapun data yang ditemukan bahwa krisis pangan di Sudan Selatan disebabkan oleh konflik internal politik etnis yang diawali dari pertarungan dua tokoh politik dari etnis berbeda dan terindikasi ingin bersaing memperoleh kekuasaan di Sudan Selatan, yaitu Presiden Salva Kiir, dengan komunitas etnis Dinka dan mantan Wakil Presiden Sudan Selatan, Riek Machar, dengan komunitas etnis Nuer. Setelah itu, peneliti mencari data mengenai dinamika pemberian bantuan dari FAO selama menangani krisis pangan di Sudan Selatan melalui situs resmi dari FAO secara langsung, yakni dari *FAO Report*.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman, yang dibagi menjadi tiga bagian. Adapun tiga bagian tersebut adalah reduksi data (mengorganisasi dan menyusun data berdasarkan isu dan konsep secara sistematis), penyajian data (proses dari pengoperasian data dengan kerangka konsep), serta kesimpulan dan verifikasi.⁵⁸

Di dalam penelitian ini, pada tahap reduksi, peneliti menyusun berdasarkan beberapa data seperti menggambarkan kondisi krisis pangan di Sudan Selatan, penyebab kemunculan krisis pangan di Sudan Selatan, tanggapan dan respon dari dunia internasional, terutama FAO yang terhambat oleh tindakan pemerintah. Di dalam penyajian data, peneliti menggunakan konsep bantuan internasional dalam mengidentifikasi bantuan FAO di Sudan Selatan. Di sisi lain, untuk menghubungkan analisis dari tindakan hambatan atau halangan pemerintah Sudan Selatan terhadap bantuan FAO diidentifikasi timbul disebabkan adanya pengaruh dari warisan kolonialisme yang terbentuk. Warisan kolonialisme di Sudan Selatan diidentifikasi terdiri dari dua, yakni pembagian etnis (*ethnic divisions*) dan transformasi relasi produksi (*transformation of productive relations*). Sehingga peneliti berfokus kepada penggunaan pendekatan post-kolonialisme dan warisan kolonialisme di Sudan Selatan. Terakhir, pada tahap kesimpulan dan verifikasi, peneliti akan menarik generalisasi apakah unsur-unsur dari warisan kolonialisme, seperti pembagian etnis (*ethnic divisions*) dan transformasi relasi produksi (*transformation of productive relations*) menjadi

⁵⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook Edition 3* (United States of America: Sage Publications, 2014): 29-32.

alasan dari pembentukan tindakan pemerintah Sudan Selatan menghalangi bantuan FAO terhadap krisis pangan di tahun 2014.

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menggambarkan secara menyeluruh dan terperinci mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Krisis Pangan di Sudan Selatan dan Dinamika Pemberian Bantuan FAO terhadap Penanganan Krisis Pangan di Sudan Selatan

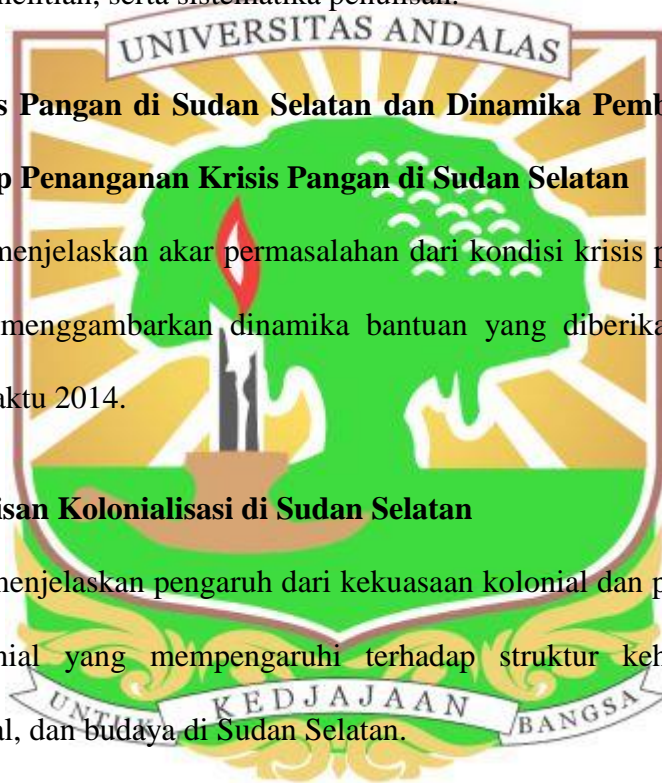
Bab ini akan menjelaskan akar permasalahan dari kondisi krisis pangan di Sudan Selatan serta menggambarkan dinamika bantuan yang diberikan FAO selama kurun batas waktu 2014.

BAB III Warisan Kolonisasi di Sudan Selatan

Bab ini akan menjelaskan pengaruh dari kekuasaan kolonial dan peninggalan atau warisan kolonial yang mempengaruhi terhadap struktur kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Sudan Selatan.

BAB IV Tindakan Pemerintah Sudan Selatan Menghalangi Bantuan FAO terhadap Krisis Pangan di Tahun 2014 Sebagai Bentuk Diskriminasi Hak-Hak Minoritas

Bab ini akan menjelaskan analisis dari tindakan pemerintah Sudan Selatan menghalangi bantuan FAO terhadap krisis pangan di tahun 2014. Selain itu,



tindakan pemerintah yang terbentuk diidentifikasi dipengaruhi oleh adanya warisan kolonialisme di Sudan Selatan.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, yang akan mencakup ide-ide dan pengetahuan terpenting dari penelitian ini dan memberikan garis besar terhadap kontribusi apa yang dapat diberikan terhadap lingkungan akademis maupun pemangku kepentingan.

